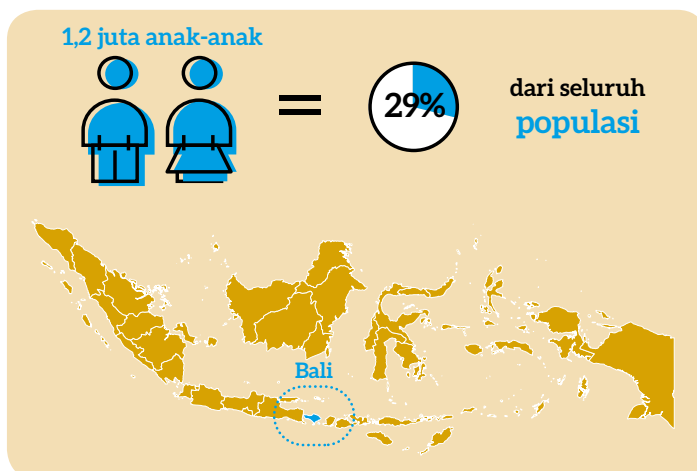




Pendahuluan

Profil singkat provinsi ini menyajikan indikator-indikator prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang terkait anak, berdasarkan survei nasional berbasis rumah tangga dan sumber data lainnya. Profil ini melengkapi *Laporan Baseline SDG tentang Anak-Anak di Indonesia* yang disusun oleh BAPPENAS dan UNICEF, untuk mendukung pemantauan dan penyusunan kebijakan berbasis bukti.

Provinsi Bali termasuk provinsi dengan jumlah penduduk muda yang signifikan. Sebanyak 1,2 juta orang atau 29 persen dari total penduduk di provinsi ini adalah anak-anak. Lebih dari enam di antara 10 anak tinggal di wilayah perkotaan. Diperlukan investasi strategis yang lebih signifikan untuk anak-anak dalam rangka mempercepat pencapaian SDG di provinsi ini.



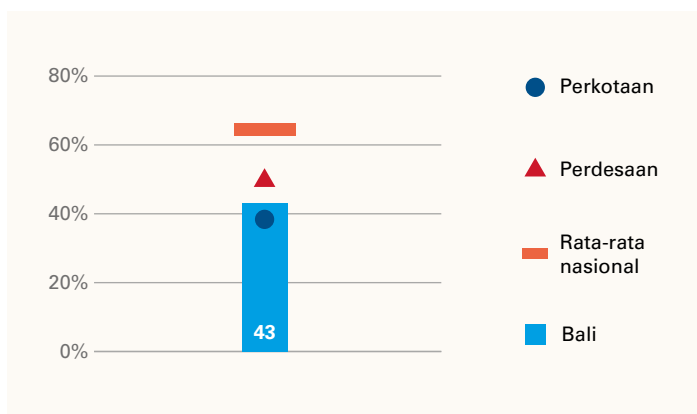
TUJUAN 1 PENGENTASAN KEMISKINAN



Sekitar 73.000 anak (6,0 persen) hidup di bawah garis kemiskinan provinsi pada tahun 2015 (Rp 10.581 per orang per hari). Namun, lebih banyak rumah tangga yang berada dalam posisi rentan dan hidup dengan pendapatan yang sedikit di atas garis kemiskinan. Selain itu, 43 persen anak mengalami deprivasi di dua dimensi kemiskinan non-pendapatan atau lebih, yang merupakan angka terendah ketiga di Indonesia.¹

Kondisi kemiskinan anak multidimensi di provinsi Bali

	Persen	Jumlah
Populasi di bawah garis kemiskinan nasional	4,7	197.000
Anak-anak < 18 di bawah garis kemiskinan nasional	6,0	73.000
Anak-anak < 18 di bawah dua kali garis kemiskinan	42,2	512.000



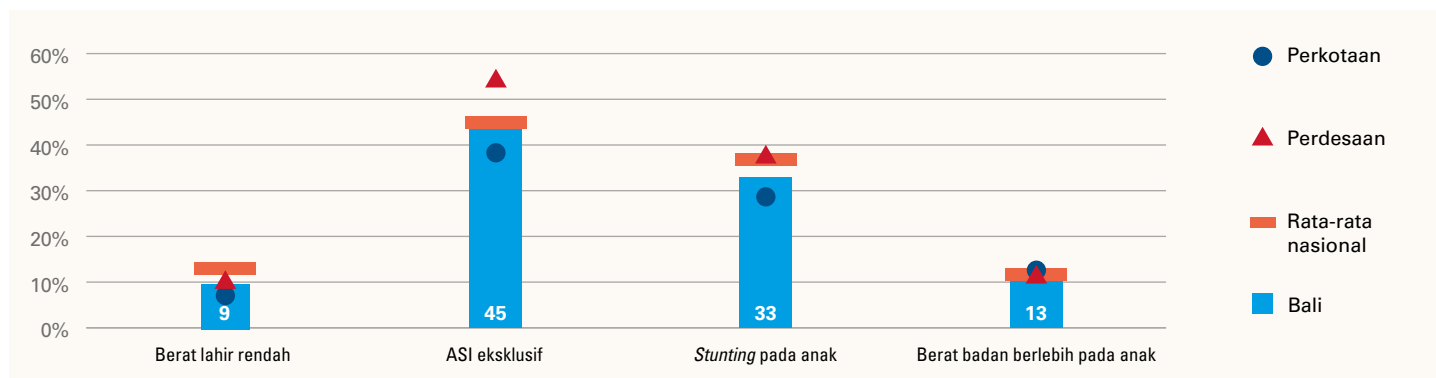
TUJUAN 2 PENGENTASAN KELAPARAN



Menerapkan praktik pemberian makan yang optimal sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan anak. Sekitar 45 persen bayi di Provinsi Bali diberikan ASI eksklusif pada enam bulan pertama kehidupannya, yang berarti sama dengan angka rata-rata nasional.

Prevalensi malnutrisi relatif tinggi, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Satu dari 10 bayi lahir dengan berat badan rendah, dan 33 persen anak di bawah lima tahun mengalami *stunting* (tinggi badan rendah dibanding usia) pada tahun 2013.

Ketimpangan berdasarkan wilayah dalam hasil pemberian makanan dan gizi anak



TUJUAN 3

KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN



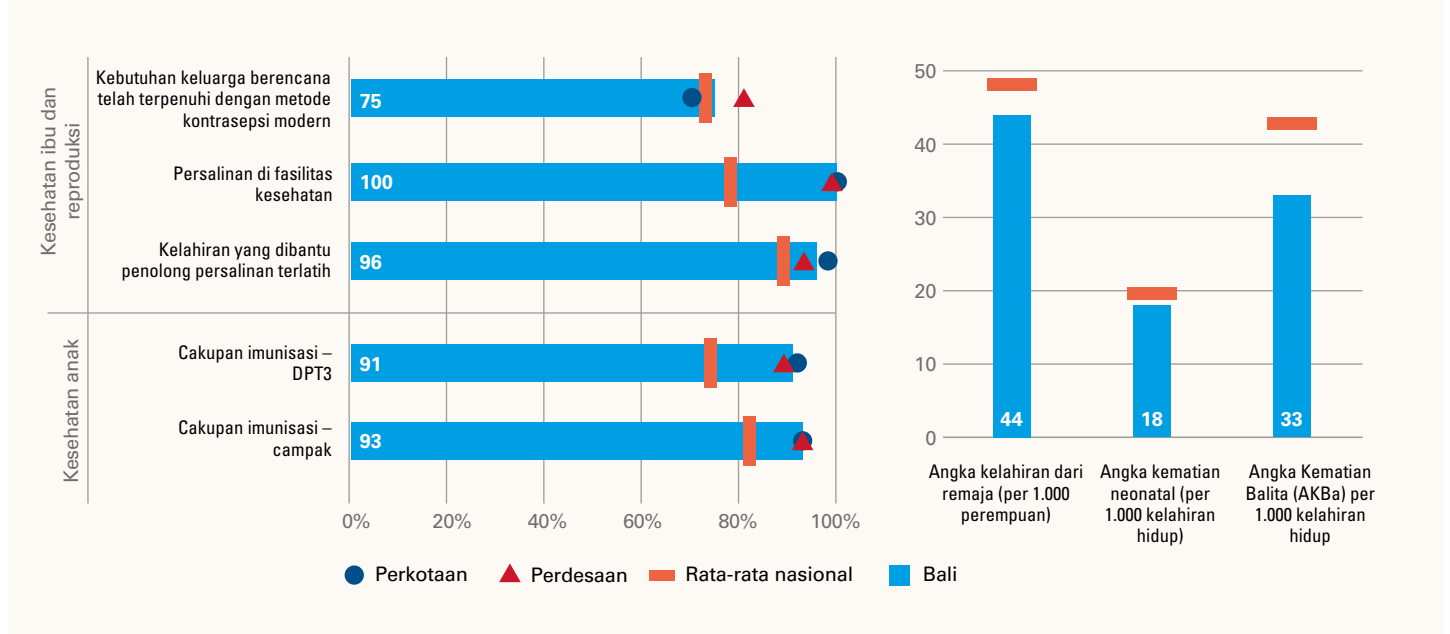
Meskipun sudah ada kemajuan, angka kematian anak masih menjadi tantangan. Untuk setiap 1.000 kelahiran hidup, 18 bayi yang baru lahir meninggal pada bulan pertama kehidupannya dan 33 meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

Hampir semua perempuan dapat mengakses layanan persalinan dan 96 persen kelahiran dibantu oleh penolong persalinan terlatih.

Namun, metode kontrasepsi modern masih perlu perbaikan, yang angkanya hanya sedikit di atas rata-rata nasional pada 2015.

Lebih dari 90 persen bayi menerima vaksinasi campak dan tiga dosis vaksin DTP yang dianjurkan. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan cakupan imunisasi yang tinggi di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Ketimpangan berdasarkan wilayah pada kesehatan ibu dan anak



TUJUAN 4

PENDIDIKAN BERKUALITAS

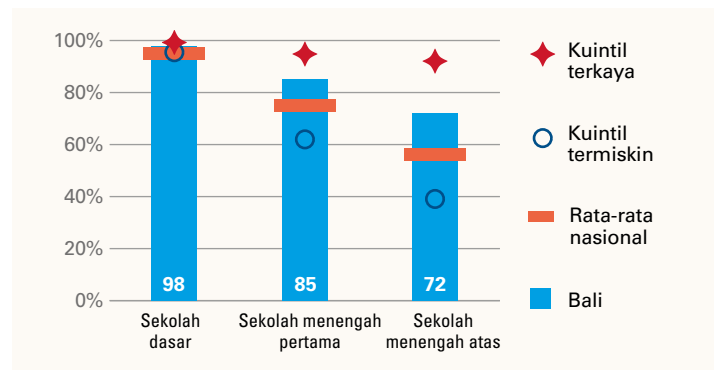


Kesiapan anak untuk masuk sekolah dasar dapat ditingkatkan dengan memasukkan anak ke program perkembangan anak usia dini. Angka partisipasi dalam pembelajaran PAUD yang terorganisir di kalangan anak usia 6 tahun mencapai 97 persen pada tahun 2015, dan sebagian besar di antaranya masuk sekolah dasar lebih cepat.

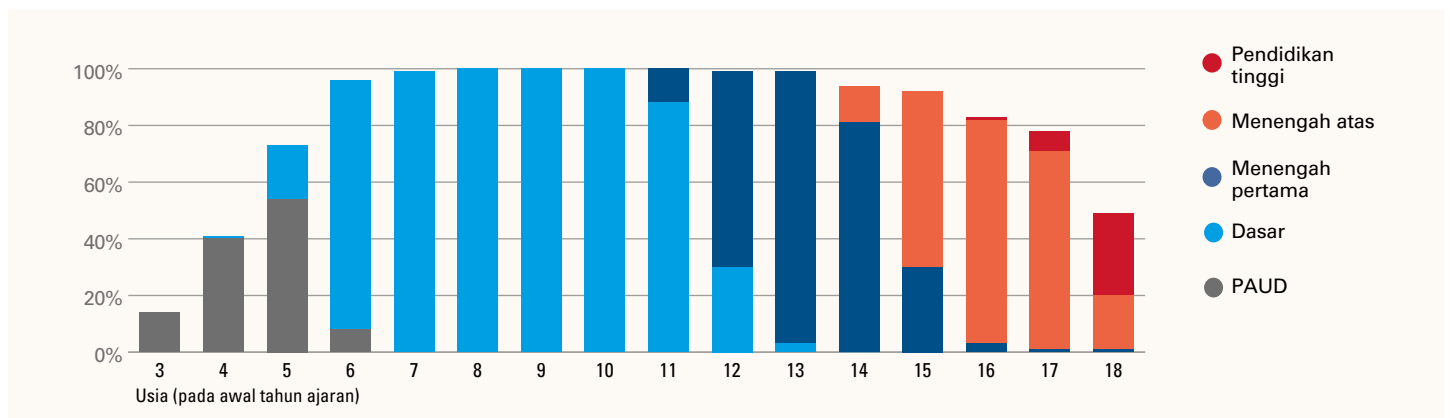
Provinsi Bali hampir mencapai akses universal pendidikan dasar. Namun, anak-anak dari rumah tangga termiskin berpeluang kurang dari 50 persen lebih rendah untuk menyelesaikan sekolah menengah dibandingkan anak-anak dari keluarga yang paling kaya.

Kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama. Hanya setengah dari anak sekolah dasar mampu mencapai ambang batas nasional minimum dalam kemampuan membaca dan seperempat dalam kemampuan matematika.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada angka penyelesaian sekolah



Persentase anak-anak yang masuk sekolah berdasarkan usia



TUJUAN 5 KESETARAAN GENDER



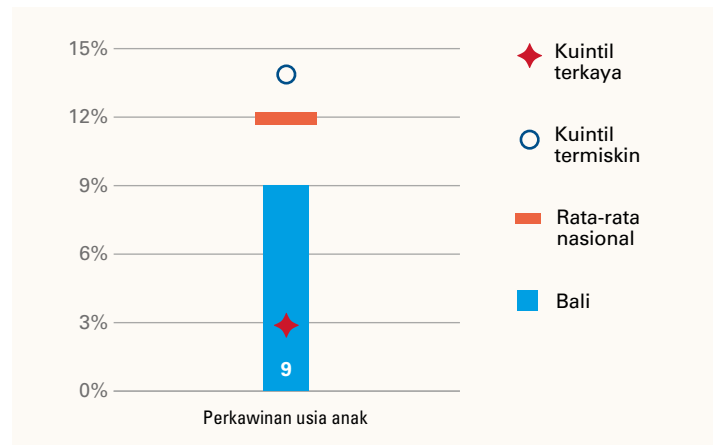
Praktik perkawinan usia anak telah menurun. Di Provinsi Bali, sekitar 9 persen perempuan usia 20–24 tahun sudah menikah atau hidup bersama sebelum berusia 18 tahun pada tahun 2015. Tingkat pernikahan anak lebih tinggi di kalangan anak perempuan dari rumah tangga termiskin.

Tidak ada data yang representatif tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di tingkat provinsi. Namun, data dari survei nasional menunjukkan bahwa jenis kekerasan ini tersebar luas: Sebanyak 28 persen dari perempuan dan anak perempuan yang pernah memiliki pasangan pernah mengalami kekerasan fisik, seksual, dan/atau psikologis yang dilakukan oleh mantan atau pasangan intimnya saat ini.

9% perempuan menikah sebelum berusia 18



Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada perkawinan usia anak



TUJUAN 6 AIR BERSIH DAN SANITASI

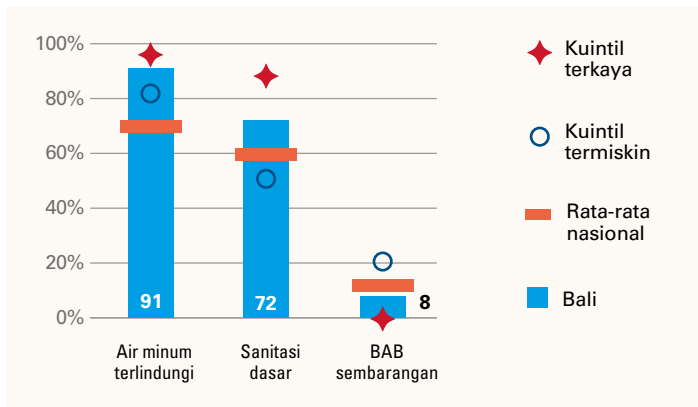


Pencapaian akses universal terhadap air minum, sanitasi, dan higienitas sangat penting untuk mempercepat kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Pada tahun 2015, hampir tiga per empat dari jumlah penduduk menggunakan fasilitas sanitasi dasar di rumah, sementara 8 persen masih mempraktikkan BAB sembarangan. Lebih dari setengah jumlah sekolah sudah memiliki fasilitas toilet terpisah untuk laki-laki dan

perempuan. Cakupan sumber air minum yang layak sudah jauh lebih tinggi, baik di rumah tangga maupun sekolah.²

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan dan tempat tinggal sangat mencolok, yang menunjukkan pentingnya mengintegrasikan prinsip keadilan ke dalam kebijakan dan praktik. Sejumlah kemajuan sudah dicapai melalui penerapan program sanitasi total berbasis masyarakat.

Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada akses air dan sanitasi



sekolah dengan layanan air dasar = 91%

Lingkungan sekolah

Sekolah dengan layanan air dasar (%)	91
Sekolah dengan fasilitas sanitasi terpisah menurut jenis kelamin (%)	56

Komunitas

Desa dan kelurahan yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (%)	44
--	----

TUJUAN 16 PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG KUAT

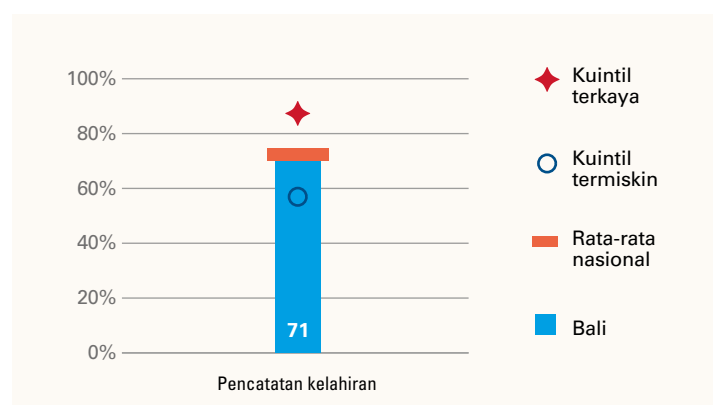


Peningkatan cakupan pencatatan kelahiran sangat penting. Pada tahun 2015, dua puluh sembilan persen anak di bawah usia 5 tahun belum memiliki akta lahir. Masih terdapat perbedaan besar antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dan berdasarkan status kekayaan rumah tangga, yang disebabkan hambatan keuangan dan ketersediaan pelayanan (*supply-side barriers*).

Anak dalam tahanan masih menjadi bentuk hukuman yang umum bagi anak yang melakukan tindak pidana, yang mana hal ini melanggar prinsip bahwa penahanan anak harus merupakan pilihan terakhir. Di Provinsi Bali, 14 persen dari seluruh anak yang ditahan belum mendapatkan putusan pengadilan, yang berarti jauh di bawah rata-rata nasional.

Hanya ada sedikit atau tidak ada data sama sekali tentang masalah perlindungan anak, seperti kekerasan terhadap anak maupun perdagangan anak.

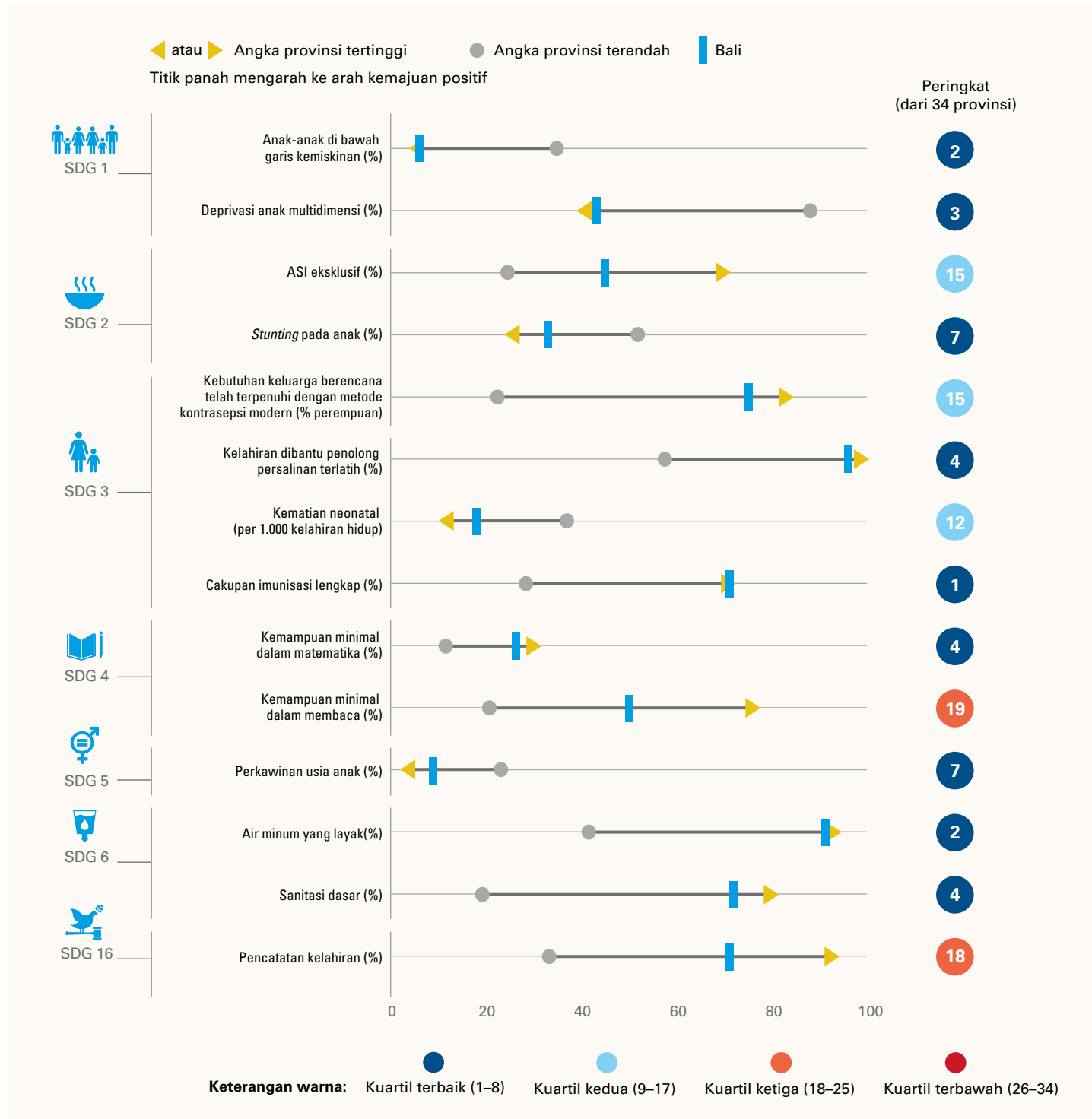
Ketimpangan berdasarkan tingkat pendapatan pada pencatatan kelahiran



KARTU NILAI (SCORECARD) PROVINSI

Kartu nilai ini berisi ringkasan kinerja Provinsi Bali dalam beberapa indikator SDG dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Grafik di bawah ini menunjukkan nilai rata-rata Provinsi Bali dan provinsi-provinsi dengan nilai tertinggi dan terendah untuk tiap indikator.

Di sisi kanan tercantum peringkat Provinsi Bali untuk setiap indikator, yaitu antara peringkat 1 untuk kinerja tertinggi dan 34 untuk kinerja terendah. Data menurut provinsi di Indonesia dibagi menjadi empat kuartil (biru tua untuk kuartil terbaik dan merah untuk kuartil terbawah).



Catatan

Sumber: Survei rumah tangga nasional (SUSENAS, RISKESDAS, SDKI) dan data administratif (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan). Informasi terperinci tentang sumber data dan definisi indikator tersedia *online* di: <https://sdg4children.or.id>

- 1 Kemiskinan anak multidimensi didefinisikan sebagai anak-anak yang mengalami deprivasi pada setidaknya dua dimensi berikut: pangan dan gizi; kesehatan; pendidikan; perumahan; air dan sanitasi; dan perlindungan.
- 2 Saat ini, Indonesia masih belum memiliki data nasional yang representatif tentang kualitas air yang dapat digunakan untuk menghitung indikator SDG terkait penggunaan layanan air minum yang dikelola secara aman. Namun setidaknya telah digunakan indikator *proxy* dalam menyusun *baseline data* untuk SDG 6.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi kami di: jakarta@unicef.org